

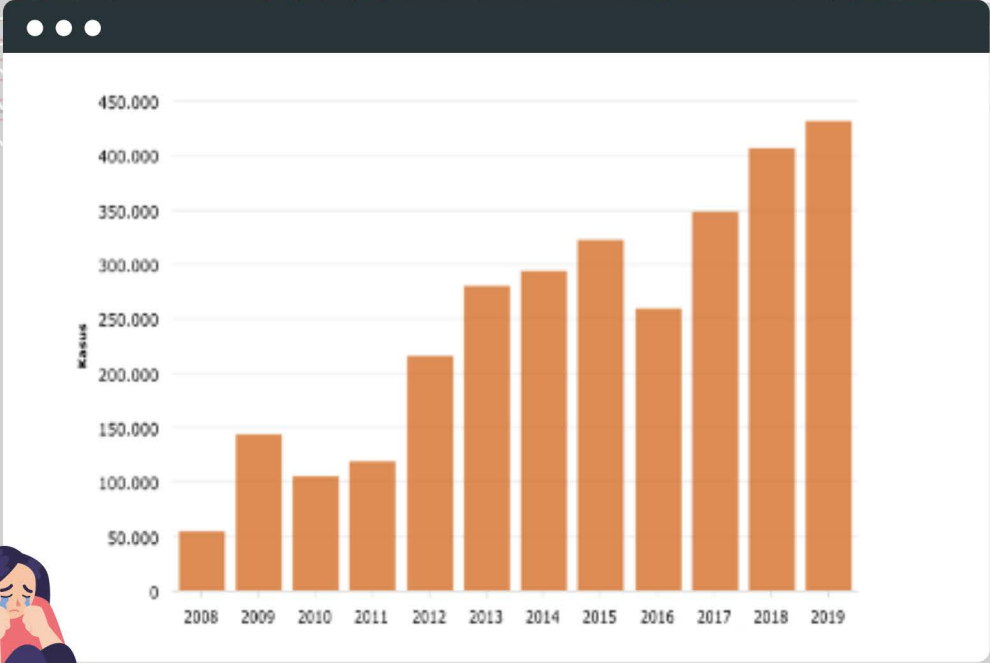
Penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia Periode 2020-2022



Rencana Aksi Nasional (RAN) merupakan instrumen utama untuk memastikan adanya kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan pemerintah di Indonesia. RAN OGI ini akan menjadi komitmen kementerian atau lembaga untuk mendorong praktik keterbukaan pemerintah bersama dengan *Civil Society Organisation* (CSO). Keterlibatan CSO dalam RAN OGI adalah perwujudan dari prinsip kokreasi dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Januari 2020, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan “Diskusi dan Pembahasan Penyusunan RAN OGI Periode 2020-2022” bersama dengan perwakilan CSO dan institusi terkait.

Rapat tersebut tidak hanya dihadiri oleh CSO yang terlibat dalam pelaksanaan RAN OGI Periode 2018-2020, tapi juga beberapa institusi dan CSO lainnya yang belum pernah terlibat dalam Rencana Aksi OGI sebelumnya. Keberagaman CSO dan institusi yang terlibat diharapkan dapat memperkaya usulan rencana aksi dan meningkatkan inklusivitas RAN OGI selanjutnya.

Perwakilan CSO menyampaikan beberapa tantangan dalam melaksanakan RAN OGI. Pertama, kurangnya sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan target RAN OGI. Kedua, dalam konteks daerah, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah cenderung fluktuatif. Hal ini merupakan imbas adanya pergantian kepala daerah.



Gambar 1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dalam Tahun 2019

Sumber: Komnas Perempuan (2020)

Kepala daerah baru memiliki visi yang berbeda dengan kepala daerah yang pernah berkomitmen dalam rencana aksi keterbukaan pemerintah, sehingga rencana aksi tidak dapat dilanjutkan.

Beberapa usulan yang disampaikan CSO terkait dengan RAN OGI periode 2020 – 2022 meliputi beberapa topik antara lain civic space, beneficial ownership, gender, akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi kesehatan, dan kualitas komitmen RAN OGI. Terkait dengan isu gender, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyampaikan pentingnya akses bantuan hukum bagi perempuan. Saat ini, bantuan hukum hanya diprioritaskan bagi masyarakat miskin. Seharusnya, akses terhadap bantuan hukum diberikan pada kaum rentan yang terdiri atas perempuan yang belum mandiri dan anak-anak. Hal ini senada dengan pendapat perwakilan Women Research Institute (WRI) yang mengungkapkan bahwa banyak terjadi tindak kekerasan pada perempuan. Di tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 450.000 kasus.

Dalam hal partisipasi publik, perwakilan WRI juga berpendapat bahwa keterlibatan perempuan yang berkualitas juga perlu diperhatikan dalam forum-forum formal pembangunan seperti Musrenbang. Kualitas keterlibatan perempuan dapat dilihat dari indikator pengaruh pendapat perempuan dalam musyawarah dan pendapat perempuan yang dapat menjadi representasi isu perempuan secara

umum. Perempuan juga perlu dilibatkan lebih jauh dalam pengambilan keputusan di desa sehingga pembangunan di desa juga akan lebih efektif dan responsif gender. Keterlibatan yang berkualitas, terutama keterlibatan anak juga didorong oleh Wahana Visi Indonesia (WVI).

Usulan lainnya juga datang dari Centre for Indonesia Strategic Development (CISDI) yang menyampaikan beberapa isu mengenai keterbukaan informasi di bidang kesehatan, terutama anggaran kesehatan. Mekanisme monitoring anggaran tingkat desa perlu dibuat agar penggunaan dana desa terutama yang terkait dengan kesehatan, dapat digunakan secara tepat dan efektif. Pemerintah juga perlu memperbaiki sistem akses dan integrasi pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Keterbukaan data menjadi kunci untuk perbaikan sistem akses dan integrasi pelayanan kesehatan. Isu keterbukaan informasi juga diungkapkan oleh Publish What You Pay (PWYP) yang mendorong keterbukaan data pengungkapan penerima manfaat (*beneficial ownership*).

Mengingat bahwa Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan bagian dari RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), Sekretariat OGI pun mengadakan pertemuan dengan Sekretariat Nasional SDGs untuk meminta usulan terkait prioritas dari masing-masing Goal dalam SDGs. Tujuan utama penyalarsan prioritas SDGs dengan RAN OGI adalah adanya komitmen bersama dari setiap kementerian atau lembaga untuk

menjadikan OGI sebagai medium untuk meningkatkan pencapaian SDGs. Dengan demikian, target SDGs diharapkan dapat tercapai tepat pada waktunya.

Proses penyusunan RAN OGI 2020 – 2022 masih dalam tahap awal penjaringan usulan rencana aksi. Masih terdapat beberapa proses yang harus dilalui untuk menghasilkan dokumen RAN OGI yang harus dikumpulkan ke Open Government Partnership tanggal 31 Desember 2020. Dalam prosesnya, Sekretariat OGI berkomitmen untuk tetap memegang prinsip keterbukaan pemerintah seperti transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabilitas.



Gambar 2. Kunjungan Sekretariat OGI ke kantor Sekretariat SDGs